

Digitalisasi Rekrutmen di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc

Elsa Frafidya¹, Muhammad Ishak Syahadat², Sri Afrianti Utami³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

frafidyaelsa@gmail.com

*Email Korespondensi: frafidyaelsa@gmail.com

Abstract:

Abstract: *This study aims to analyze the use of the Siakba application (Information System for KPU Members and Ad Hoc Bodies) in the recruitment process of ad hoc personnel at the General Election Commission (KPU) of South Konawe Regency. The research method employed is qualitative with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews with the Chairperson of KPU, PPS members, and KPPS members, as well as through document analysis. The results show that the Siakba application facilitates and enhances the transparency of the recruitment process, which was previously conducted manually. The application also accelerates the administration and verification process for prospective members and ensures equal opportunities for the public to participate in the election. However, technical challenges such as limited internet access remain obstacles in certain regions. In conclusion, the use of the Siakba application is effective in improving the efficiency and accountability of the ad hoc personnel recruitment process in the KPU of South Konawe Regency.*

Keywords: *Siakba, recruitment, ad hoc personnel, KPU, South Konawe Regency.*

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (Siakba) dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Ketua KPU, anggota PPS, dan anggota KPPS, serta melalui studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Siakba memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Aplikasi ini juga mempercepat proses administrasi dan verifikasi pendaftaran calon anggota, serta memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun demikian, beberapa hambatan teknis seperti akses internet yang terbatas menjadi tantangan dalam implementasi aplikasi ini di wilayah tertentu. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi Siakba efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses rekrutmen tenaga ad hoc di KPU Kabupaten Konawe Selatan.

Kata Kunci: Siakba, rekrutmen, tenaga ad hoc, KPU, Konawe Selatan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, termasuk dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebelumnya, proses rekrutmen ini dilakukan secara manual, yang sering kali menimbulkan berbagai masalah seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya transparansi, dan tingginya potensi human error (Febriyan, 2022). Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPU meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc

(Siakba), sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses rekrutmen secara digital (Mita, 2023).

Aplikasi Siakba memungkinkan calon anggota PPK dan PPS untuk mendaftar secara online, mengunggah dokumen persyaratan, serta mengikuti seluruh proses seleksi tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Digitalisasi proses ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen berlangsung secara transparan dan adil (Muhammad Amin et al., 2023). Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan KPU untuk memonitor proses seleksi secara real-time, memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku (Mita, 2023). Dengan demikian, Siakba menjadi salah satu solusi inovatif dalam upaya modernisasi sistem rekrutmen tenaga ad hoc di Indonesia.

Meskipun aplikasi ini menawarkan berbagai manfaat, beberapa kendala tetap dihadapi dalam implementasinya, terutama di wilayah dengan akses internet yang terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa anggota KPPS, kendala teknis seperti sinyal internet yang lemah serta pemadaman listrik yang sering terjadi di beberapa daerah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pendaftaran online melalui Siakba (Anggita, 2024). Selain itu, meskipun KPU telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi ini, masih ada sebagian masyarakat yang belum familiar dengan teknologi, sehingga diperlukan upaya edukasi lebih lanjut (Muhammad Amin et al., 2023).

Di sisi lain, pengenalan aplikasi Siakba juga telah mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen. Dengan adanya sistem pendaftaran yang terbuka dan transparan, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar sebagai tenaga ad hoc, tanpa harus bergantung pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan administrasi atau nepotisme (Febriyan, 2022). Hal ini sesuai dengan tujuan KPU untuk menciptakan proses rekrutmen yang lebih inklusif dan akuntabel, serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi publik dalam pemilu (Harjudin, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aplikasi Siakba digunakan dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi selama implementasi aplikasi ini serta dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan aplikasi digital dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks rekrutmen tenaga ad hoc.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penggunaan aplikasi Siakba dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali pengalaman dan persepsi para informan mengenai implementasi aplikasi ini (Husain et al., 2020). Pendekatan ini cocok digunakan untuk studi yang bersifat eksploratif dan bertujuan menggambarkan fenomena secara rinci (Bilu & Tunda, 2023). Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Teknik *purposive sampling* dipilih agar peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dari individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam penggunaan aplikasi Siakba (Suaib et al., 2023). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi KPU, buku, artikel jurnal, dan sumber daring yang relevan, yang digunakan

untuk melengkapi hasil wawancara (Muhammad Amin et al., 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung dari informan mengenai proses dan tantangan penggunaan aplikasi Siakba (Harjudin, 2020). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara, terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan KPU dalam rekrutmen tenaga ad hoc (Febriyan, 2022). Analisis data dilakukan melalui pengkodean tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi direduksi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk menemukan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Bilu & Tunda, 2023). Teknik triangulasi digunakan untuk menjaga validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data serta melakukan pengecekan ulang hasil wawancara dengan dokumen yang ada (Muhammad Amin et al., 2023). Proses triangulasi ini penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan dalam penelitian kualitatif (Husain et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi Siakba memberikan kemudahan signifikan dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan pada 12 Februari 2024, aplikasi ini mempercepat proses administrasi dengan memungkinkan pendaftar mengunggah dokumen secara online. Hal ini membantu mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi pada sistem manual.

Tahapan pendaftaran Anggota Ad Hoc Melalui Aplikasi SIAKBA

1. Langkah pertama membuat akun SIAKBA,
2. kedua mengaktifkan akun,
3. ketiga login akun,
4. keempat masuk menu daftar, mengisi biodata dan curriculum vitae,
5. Kelima, pilih jenis seleksi, lalu upload berkas dan dokumen yang diperlukan (Foto, E-KTP, ijazah akhir, surat tanda registrasi, surat keterangan, DRH, surat keterangan sehat). Setelah melakukan pengiriman data,
6. keenam adalah pemohon dapat melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang diterima KPU dengan ketentuan lengkap (kwitansi pendaftaran dikirimkan ke pemohon melalui email), jika kurang lengkap (sampaikan pemberitahuan melalui email untuk melengkapi berkas sampai batas waktu pendaftaran berakhir,
7. Ketujuh untuk pengecekan hasil verifikasi administrasi,
8. Kedelapan untuk pengecekan tes tertulis. hasil, kesembilan untuk memeriksa hasil wawancara dan terakhir untuk memeriksa hasil seleksi,

kesembilan untuk memeriksa hasil wawancara dan terakhir untuk memeriksa hasil seleksi.

Dalam rekrutmen anggota Ad Hoc (KPPS) desa mekar jaya Kabupaten konawe selatan sendiri memiliki beberapa tahap yaitu:

1. Sosialisasi aplikasi SIAKBA untuk calon anggota KPPS

**Gambar 1 Sosialisasi Anggota KPU
Kabupaten konawe Selatan Mengenai Aplikasi SIAKBA(2023)**



Grup Whatsapp Resmi KPPS Desa Mekar jaya

Pada tanggal 25 November 2023 Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan Melakukan Sosialisasi mengenai aplikasi (Sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc) SIAKBA, Kegiatan ini dilakukan di rumah ketua PPS karena tempat yang strategis dan tersedia beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh para calon anggota KPPS desa mekar jaya. kegiatan ini dilakukan oleh anggota KPU kabupaten konawe selatan dan dihadiri oleh semua calon anggota KPPS desa mekar jaya kec.baito kabupaten konawe selatan tepatnya ada 23 orang dan juga di hadiri oleh ketua PPS desa mekar jaya.

Dalam hal ini pihak KPU kabupaten konawe selatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi (Sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc) SIAKBA yang dimana aplikasi SIAKBA ini merupakan hal yang baru dari KPU sehingga KPU melakukan sosialisasi sebagai tahap pengenalan atas aplikasi yang baru diluncurkan oleh KPU, Didalam sosialisasi tersebut KPU kabupaten Konawe Selatan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi (Sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc) SIAKBA tersebut dan juga kegunaan dari aplikasi ini, sosialisasi ini dilakukan agar memberi perhatian untuk masyarakat agar pada saat proses perekrutan masyarakat mendapatkan kemudahan dan juga mengerti tata cara penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir. Untuk kegiatan sosialisasi ini hanya dilakukan satu kali sebelum pengumuman pendaftaran dikeluarkan oleh KPU.

2. Pengumuman Pendaftaran

Gambar 2 Jadwal pembentukan KPPS pemilihan umum tahun 2024

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	JADWAL
1.	Pengumuman Pendaftaran	11 - 15 Desember 2023
2.	Penerimaan Pendaftaran	11 - 20 Desember 2023
3.	Penelitian administrasi	11 - 22 Desember 2023
4.	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi	23 - 25 Desember 2023
5.	Tanggapan & masukan masyarakat	23 - 28 Desember 2023
6.	Pengumuman hasil seleksi	29 - 30 Desember 2023
7.	Penetapan anggota KPPS	24 Januari 2024
8.	Pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024

Sumber (kpu.go.id2023)

Pada tanggal 11-15 Desember 2023 Pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan Resmi membuka pengumuman pendaftar calon anggota Ad Hoc (KPPS) Hal tersebut dapat di lihat/diakses oleh semua masyarakat di Laman resmi KPU Kabupaten konawe selatan.

3. Penerimaan Pendaftaran

Pada tanggal 11-20 Desember 2023 Pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan Resmi membuka pendaftaran bagi para calon anggota Ad Hoc, Pada proses ini para pendaftar wajib mengupload berkas di aplikasi (Sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc) SIAKBA. Berkas yang harus dipenuhi adalah (Fotocopy E-KTP, Foto ijazah SMA/SMK Sederajat, Pas Foto Ukuran 3x4 Berwarna merah 3 Lembar, Surat keterangan sehat dari puskesmas/Rumah

Sakit/klinik). Masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS wajib mengumpulkan salinan berkas kepada ketua PPS dan kemudian akan di bawa oleh ketua PPS ke KPU kabupaten konawe selatan sebagai arsip di kantor KPU kabupaten konawe selatan.

4. Penelitian Administrasi

Pada tanggal 11-22 Desember anggota KPU melakukan penelitian administrasi dikantor KPU kabupaten konawe selatan, penelitian administrasi ini terkait kelengkapan berkas dari para calon anggota KPPS yang mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS.

5. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Pada tanggal 23-25 Desember 2023 anggota KPU kabupaten konawe selatan mengumumkan siapa-siapa sajakah yang lulus dalam hasil seleksi tahap administrasi.

6. Pengumuman dan masukan masyarakat

Pada tanggal 23-28 Desember 2023 KPU kabupaten konawe selatan mengumumkan dari masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat kabupaten konawe selatan.

Gambar 3 Wawancara Kepada Tiap Calon Anggota Ad Hoc (KPPS) (2023)



(Grup Whatsapp Resmi KPPS Desa Mekar jaya,(2023)

Pada tanggal 20-25 Desember 2023 Pihak KPU kabupaten konawe selatan melakukan wawancara kepada para calon anggota Ad Hoc (KPPS) Hal ini dilakukan kepada tiap masyarakat yang telah dinyatakan lolos pemberkasan.

7. Pengumuman hasil seleksi

Gambar 4 nama-nama masyarakat yang terpilih menjadi anggota KPPS Desa Mekar jaya tahun 2024

TEMPLATE PEMBUATAN ANUN SIARBA KPPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024					
NO.	NAMA DESA/KEKELURAHAN	NAMA KPPS	EMAIL	STATUS	TPS
4	MEKARJAYA	APRILIA SUJANTI	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	1
		YUSTIKA WILANDARI	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	1
		ALDIYANTO	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	1
		RIAN ANDRIANTO	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	1
		RESKA YULIANI	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	1
		ALISA PRADHYA	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 2	1
		ANGGITA PUTRI BUDATI	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 1	1
		SUSI SUSANTI	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	2
		MIRONAH	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	2
		INTAN NURHALIAH	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 1	2
		JANSIATI	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 2	2
		SARWAN NARA	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	2
		RIDWAN RIANTO	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	2
		RINDU ALFIANTO	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	2
		RELS SAH HULHAIDAH	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 2	3
		SRI SUMIATI	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	3
		SRI SARAHYTO	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	3
		SANDRO SETYAWAN	kppst4023@kpu.go.id	Bukan Penggama	3
		HICHADIN	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 1	3
		WINDA FIRDAYANTI	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 1	3
SELIN FORHENDIY	kppst4023@kpu.go.id	SREKAP 1	3		

(Grup Whatsapp Resmi KPPS Desa Mekar jaya,(2023)

Pada tanggal 29-30 Desember 2023 Pengumuman hasil seleksi Calon anggota Ad Hoc (KPPS) Pada tahap ini para pendaftar dapat mengetahui siapa sajakah yang lolos menjadi

anggota Ad Hoc (KPPS). KPU resmi menetapkan anggota KPPS yang telah lulus dalam seleksi anggota KPPS dan juga penetapan tugas dan TPS masing-masing.

8. Penetapan Anggota Ad Hoc (KPPS)

Pada tanggal 24 Januari 2024 para pendaftar yang telah lolos menjadi anggota Ad Hoc (KPPS) mendapatkan tugas mulai dari Ketua TPS, KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6 Dan KPPS 7.

9. Pelantikan Anggota Ad Hoc (KPPS)

Gambar 5 Pelantikan Anggota Ad Hoc (KPPS) (2024)



(Grup Whatsapp Resmi KPPS Desa Mekar jaya, 2023)

Pada tanggal 25 Januari 2024 Anggota Ad Hoc (KPPS) Resmi menjadi bagian dari panitia penyelenggara pemilu tahun 2024, Dalam kegiatan ini masyarakat yang telah resmi menjadi anggota KPU telah mengetahui apa sajakah tugas masing-masing dan juga mengetahui dengan jelas konsekuensi jika ada anggota KPPS yang menyalahgunakan namanya. Pada Rekrutmen tenaga Ad Hoc tahun 2024 KPU kabupaten konawe selatan menggunakan sistem rekrutmen terbuka, Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Yunan selaku ketua KPU kabupaten konawe Selatan.

“Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh KPU agar tidak terjadi kesalahan yang sama terhadap anggota Ad Hoc seperti tahun sebelumnya hal-hal yang diperbarui diantaranya adalah. Membatasi usia pendaftar ,pendaftar wajib mencantumkan surat keterangan sehat, pendaftar tidak memiliki penyakit bawaan dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu KPU juga mengubah sistem rekrutmen pada tenaga Ad Hoc dari sistem rekrutmen tertutup menjadi sistem rekrutmen terbuka,perbedaan antara sistem rekrutmen pada tahun sebelumnya dengan tahun 2024 adalah. Pada tahun sebelumnya para pendaftar yang ingin menjadi anggota Ad Hoc melakukan pendaftaran secara manual dan mulai dari tahap pendaftaran hingga pelantikan anggota Ad Hoc masyarakat tidak dapat melihat perkembangan dan hanya akan diberitahukan hasil dari seleksi dari pendaftaran calon anggota Ad Hoc, Kemudian sistem rekrutmen pada tahun 2024 KPU menggunakan sistem rekrutmen terbuka hal ini dapat dilihat dari proses pendaftaran calon anggota Ad Hoc hingga pengumuman hasil seleksi, Hal ini dapat dilihat oleh siapa saja karena semua tahap ada pada aplikasi (Sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc) SIAKBA” (5 Februari 2024)

Dalam hal ini KPU kabupaten Konawe Selatan menentukan siapa saja yang bisa bergabung dalam anggota Ad Hoc secara terbuka, hal ini tentunya menjadi pandangan yang baik bagi masyarakat karena merasa diperhatikan dari segi kesehatan dan keterbukaan pada proses rekrutmen tenaga Ad Hoc agar tidak terulang kembali hal-hal yang seperti tahun sebelumnya.

Dalam tiap priode pemilu memiliki perbedaan Rekrutmen anggota Ad Hoc termasuk pada pemilu tahun 2024, Hasil wawancara Ibu Nur Ajjah selaku anggota PPS tahun 2024:

“Ada perbedaan Rekrutmen tiap priodenya terutama pada priode 2024 pada Rekrutmen anggota Ad Hoc kabupaten konawe selatan menggunakan aplikasi (Sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc) SIAKBA yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya Rekrutmen anggota Ad Hoc dilakukan secara manual.” (10 Februari 2024)

Dalam Rekrutmen terbuka calon anggota Ad Hoc pada pemilu 2024 memiliki hambatan. Hasil wawancara Ibu Anggita selaku anggota KPPS tahun 2024:

“Faktor penghambat yang dialami oleh salah satu anggota KPPS adalah ada pihak yang mendaftarkan nama beliau dalam parpol tanpa izin dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pada saat pendaftaran beliau harus melakukan penghapusan nama dari parpol tersebut. dan untuk faktor penghambat pendafataran menggunakan aplikasi (Sistem informasi anggota KPU dan badan Ad Hoc) SIAKBA Adalah proses menggunakan sistem online ini mengharuskan semua pendafartar mencari posisi strategis untuk mendapatkan signal yang bagus hal ini sebenarnya menjadi kendala karena pada saat proses pendaftaran tersebut kabupaten konawe selatan sedang ada pemadaman listrik secara bergilir dan ketika listrik di daerah saya padam maka signal yang ada otomatis juga hilang, hal ini menjadi penghambat karena pemadaman listrik ini tidak lah sebentar dan terus terjadi setiap hari” (12 Februari 2024)

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa digitalisasi proses rekrutmen dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi (Muhammad Amin et al., 2023). Aplikasi Siakba terbukti memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan data, meminimalisir kesalahan administratif, serta memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Namun, tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur di wilayah pedesaan.

Hal ini sesuai dengan teori digital divide, di mana akses ke teknologi seringkali tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan (Harjudin, 2020). Oleh karena itu, upaya untuk menjembatani kesenjangan ini, baik melalui peningkatan infrastruktur teknologi maupun pelatihan yang lebih intensif bagi masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi, menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat dari aplikasi seperti Siakba dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, dari sudut pandang partisipasi politik, aplikasi Siakba juga berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu, sesuai dengan prinsip demokrasi yang inklusif. Dengan menyediakan platform yang mudah diakses, KPU berhasil membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa digitalisasi harus diimbangi dengan kebijakan yang inklusif untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi, dapat berpartisipasi secara setara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Siakba berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Aplikasi ini mempermudah proses administrasi dengan memungkinkan calon pendaftar untuk mengunggah dokumen secara online, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dan mempercepat proses seleksi. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala teknis, terutama terkait dengan keterbatasan akses internet di daerah pedesaan dan pemadaman listrik yang sering terjadi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan solusi seperti peningkatan infrastruktur teknologi di daerah terpencil atau alternatif pendaftaran secara offline. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penggunaan aplikasi perlu diperluas agar semua calon pendaftar, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi, dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan optimal. Digitalisasi rekrutmen seperti ini memiliki potensi besar untuk diterapkan di daerah lain, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilu, L., & Tunda, A. (2023). Dampak kebijakan dalam jaringan terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan dasar pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. *Journal Publicuho*, 6(2), 693-701.
- Febriyan, A. (2022). Banyak pelanggaran, KPU minta rekrutmen PPK dan PPS dilakukan profesional. *Republika*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/rly261382/banyakpelanggaran-kpu-minta-rekrutmen-ppk-dan-pps-dilakukan-profesional>
- Febriyan, A. (2022). Mengapa batas maksimal usia petugas KPPS 55 tahun? Ini penjelasan KPU. *Republika*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/rjr32c409/mengapa-batasmaksimal-usia-petugas-kpps-55-tahun-ini-penjelasan-kpu>
- Harjudin, L. (2020). Dilema penanganan COVID-19: Antara legitimasi pemerintah dan kepatuhan masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 2716(3857), 10-20.
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis evaluasi badan penyelenggara ad hoc pemilihan umum 2019 di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131-145.
- Mita, S., Wulandari, A. T., & lainnya. (2023). Implementasi aplikasi SIAKBA panitia penerimaan panitia pemilihan kecamatan di Kota Semarang. *Journal Publicuho*, 6(2), 1-12.
- Muhammad Amin, M., & lainnya. (2023). Bimbingan teknis pembentukan badan ad hoc melalui aplikasi. *Journal of Political Science*, 6(1), 1-12.
- Suaib, E., La Ode Mustafa, R., & Iskandar, N. (2023). Analisis kebijakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020. *Journal Publicuho*, 6(1), 1-12.